



---

## Bahaya Keterlibatan Hierarki Gereja Dalam Politik Praktis

---

Joseph Ohoiledjaan

Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon

[joshohoiledjaan@gmail.com](mailto:joshohoiledjaan@gmail.com)

Ignasius Samson Sudirman Refo

STPAK St. Yohannis Penginjil Ambon

[ignasius.refo@gmail.com](mailto:ignasius.refo@gmail.com)

---

**Diajukan: 3 November 2023; Direview: 16 Desember 2023 ; Diterima: 5 Januari 2024;  
Dipublish: 29 Januari 2024**

---

**ABSTRACT:** *The purpose of this article is to explore the dangers of hierarchical involvement in practical politics and its impact on political stability, freedom of expression, and political participation of the community. The method used in this article is by using a qualitative approach with a library research method. This method will include an analysis of case studies and related literature. The results obtained from this article are the declining public trust in the church. The loss of reputation of the hierarchy in the church, which is independent and neutral in political affairs. The confusion in policy-making that has a negative impact on society. The prioritization of political interests and the abuse of church positions in their duty to teach justice and morality.*

**KEYWORDS:** Hierarki, Politik Praktis, Gereja Katolik.

### Pendahuluan

Keterlibatan pejabat Gereja Katolik dalam politik praktis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hubungan antara agama dan negara, serta antara Gereja dan umatnya. Gereja Katolik, sebagai salah satu institusi keagamaan, memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Namun, keterlibatan pejabat Gereja dalam politik praktis dapat membawa bahaya bagi prinsip pemisahan antara agama dan negara. Dalam situasi tertentu, pejabat Gereja dapat mencampuradukkan kepentingan agama dengan kepentingan politik, yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk memaksakan pandangan agama tertentu pada masyarakat

yang beragam. Hal ini dapat berdampak pada kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Selain itu, keterlibatan pejabat Gereja Katolik dalam politik praktis juga dapat memicu konflik dan polarisasi sosial. Keterlibatan ini dapat memperkuat identitas agama dan kelompok tertentu, dan mengabaikan kepentingan dan hak-hak kelompok lain dalam masyarakat yang lebih luas. Hal ini dapat memicu konflik antar-kelompok, dan pada akhirnya dapat berujung pada kekerasan.

Dalam beberapa kasus, keterlibatan pejabat Gereja dalam politik praktis juga dapat menimbulkan masalah. Pejabat Gereja yang terlibat dalam politik praktis dapat memanfaatkan posisi dan pengaruh mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, daripada untuk kepentingan umat dan masyarakat yang lebih luas.

Tema tentang keterlibatan pejabat dalam politik praktis juga telah dikaji dalam beberapa artikel atau jurnal. Misalnya dalam jurnal “Kajian Komunikasi” telah membahas tentang “relasi kuasa dan simbol-simbol ekonomi politik Gereja dalam kontestasi politik lokal NTT”<sup>1</sup>.

Dalam kontestasi politik di NTT lebih banyak berlangsung dengan kondisi hegemonik ketimbang dominatif. Politik identitas Agama di NTT merupakan sebuah fenomena yang sudah berlangsung cukup lama sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terus dipraktikkan baik itu dalam masyarakat NTT, rezim politik dan juga gereja sama-sama terhemogeni dengan praktik-praktik yang sudah menjadi kebiasaan setempat.

Politik identitas selalu berada dalam ketegangan antara “Yang Sama” dan “Yang Lain” atau dengan istilah lain yakni antara “Superior” dan “Inferior”. Selain itu politik di NTT juga merupakan semacam suatu dorongan psikologis yang dikonstruksikan secara sosial, sehingga lebih mengutamakan prinsip superioritas ke-Katolik-an. Adanya anggapan bahwa dengan memilih calon yang

---

<sup>1</sup>Mikhael Rajamuda Bataona and Atwar Bajari, “Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 121–35.

seiman merupakan suatu bentuk partisipasi dalam memenangkan superioritas ke-Katolik-an. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh otoritas gereja maupun rezim politik.

Donatus Sermada dalam artikelnya “Hubungan Agama dan Negara di NKRI dalam Sorotan Filsafat Politik” menjelaskan bahwa dampak politik praktis oleh hierarki sering membawa perpecahan dalam gereja. Terdapat dua kubu yang pro dan kontra dengan ordinariis gereja. Adanya kelompok awam Katolik bersama sebagian klerus yang pro dengan uskup, tetapi ada pula kelompok umat Katolik bersama sebagian hierarki yang kontra uskup.<sup>2</sup> Peristiwa ini menandakan bahwa ketika gereja terlibat dalam politik praktis atau ketika kejujuran, kebenaran, keadilan terbenam dalam politik kekuasaan, maka ada kemungkinan perpecahan terjadi dalam tubuh gereja sendiri.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan tentang dampak politik kekuasaan yang dipraktikkan oleh hierarki gereja. Adanya temuan dalam penelitian di atas adalah perpecahan dalam umat awam atau antar hierarki, akibat perbedaan pilihan. Unsur-unsur lain akibat politik praktis oleh pejabat gereja belum dieksplorasi. Dalam penelitian ini akan sedikit menyentil latar belakang praktik politik kekuasaan oleh hierarki gereja dan konsekuensi-konsekuensi terhadap umat awam serta bagi kaum hierarki sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bahaya keterlibatan hierarki dalam politik praktis dan dampaknya pada stabilitas politik, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik masyarakat. Hal ini akan ditempuh dengan menganalisis dampak dari keterlibatan hierarki dalam politik praktis terhadap stabilitas politik dan keamanan. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana keterlibatan hierarki dalam politik praktis dapat mengurangi kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia dan mengevaluasi dampak keterlibatan hierarki dalam politik praktis terhadap partisipasi politik masyarakat dan representasi politik. Akhirnya, menemukan solusi dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi bahaya keterlibatan hierarki dalam politik praktis dan meningkatkan partisipasi politik yang berkelanjutan. Dengan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang

---

<sup>2</sup>Donatus Sermad, “Hubungan Antara Agama dan Negara Di NKRI Dalam Sorotan Filsafat Politik,” *Jurnal Studia Philosophica Theologica* Vol. 33, No. 32, 2023 (2022): 40–62.

bahaya keterlibatan hierarki dalam politik praktis dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi politik yang sehat dan transparan.

Metode yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Metode ini akan mencakup analisis terhadap studi kasus dan literatur terkait. Adapun teknik analisis menggunakan teknik Milles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya keterlibatan hierarki dalam politik praktis dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi politik yang sehat dan transparan.

## Hasil dan Pembahasan

### Hierarki dan Politik Praktis

Politik adalah cara atau usaha untuk memengaruhi suatu sistem atau kebijakan yang bersifat publik. Menurut pandangan Mariam, politik adalah usaha untuk menanggapi kehidupan yang baik<sup>3</sup>. Sebagai pemimpin, kaum hierarki dapat memiliki peranan yang besar dalam aktivitas politik praktis. Peranan yang dimiliki bukan karena jabatan imamatnya atau kredibilitasnya sebagai seorang gembala umat, tetapi legalitas *potetas* yang diberikan baginya sebagai pimpinan umat pada suatu paroki atau lembaga tertentu. Jika menurut Machavelli, sebagaimana dikutip oleh Armanda Aryanto dalam buku *Berfilsafat Politik*, politik pertama-tama merupakan soal kekuasaan, soal bagaimana kekuasaan direbut, direngkuh dan dijalankan dengan efektif<sup>4</sup>, maka para pejabat gereja atau hierarki dalam kuasa mereka dapat berpengaruh dalam politik praktis.

---

<sup>3</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 7th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

<sup>4</sup>E. Armanda Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 5th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2015).

Menurut Mikhael, atribut seperti kharisma dan keistimewaan dalam diri “seorang pemimpin” terkadang merupakan sumber kekuasaan yang krusial<sup>5</sup>. Sikap empati hierarki dalam politik sangat perlu dalam bimbingan dan kajian moralitas politik yang etis. Namun menjadi tidak etis bila bersikap apatis atas situasi politik, atau tindakan praktis politis hierarki mengabaikan substansi politik Gereja. Prinsip utama politik Gereja adalah membangun *bonum commune*, kebaikan umum. Kebaikan umum mencakup kesejahteraan bersama, tanpa ada batasan tertentu. Tidak ada sekat dalam minoritas dan mayoritas pada agama, suku, etnis atau ras dan golongan dalam masyarakat. Tidak ada prinsip individualisme, primordialisme, atau sektarianisme. Semuanya dipandang sebagai entitas yang pantas diperhatikan dengan saksama. Konsekuensi dalam mengabaikan suatu elemen sosial akan berdampak pada perpecahan atau kehancuran dalam masyarakat.

Praksis pastoral kaum hierarki seringkali kurang memperhatikan tindakan moral politik dan transparansi dalam tindakan politik praktis. Padahal tindakan politik demi memajukan moral politik oleh hierarki Gereja adalah positif demi memperjuangkan kemanusiaan. Namun menjadi tidak etis tindakan politis hierarki bila dengan transparan memproklamirkan sikap dukungannya terhadap kandidatnya. Sebab kaum hirarkis Gereja pertama-tama dipandang sebagai otoritas keagamaan sekaligus dalam posisinya sebagai kekuatan *civil society* dalam negara dengan tugasnya menjaga moral dan damai di tengah masyarakat. Namun, bagi para kandidat dalam kontestasi politik memiliki keyakinan bahwa otoritas Gereja memiliki kekuatan untuk mendukung elektoral. Keyakinan ini pun menjadi sebuah habitus, sehingga seolah-olah dalam setiap kontestasi di daerah dengan jumlah pemilih kristiani yang signifikan, kemenangan atau kekalahan ditentukan pula oleh otoritas Gereja.

Fakta yang terjadi di beberapa daerah, menggambarkan bahwa seringkali kaum hierarki turut berpartisipasi dalam politik praktis. Hal tersebut terlihat dalam sikap dan tindakan para imam yang ikut dalam urusan politik. Beberapa contoh dalam skala internasional, antara lain:

---

<sup>5</sup>Bataona and Bajari, “Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa.”

- Pemilu presiden Amerika Serikat 2020: Dalam pemilihan presiden AS tahun 2020, terdapat beberapa imam dan uskup yang terlibat dalam kegiatan politik, baik secara terbuka maupun terselelubung, dengan mendukung salah satu kandidat. Hal ini menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan gereja, karena adanya perbedaan pandangan politik dan kepentingan yang berbeda-beda.<sup>6</sup>
- Pemilihan Umum Brasil 2018: dalam pemilihan umum Brasil 2018, beberapa uskup dan imam dikritik karena terlibat dalam dukungan politik tertentu dan menyebarkan pesan-pesan politik melalui media sosial. Hal ini menimbulkan perpecahan dalam gereja dan masyarakat Brasil.<sup>7</sup>
- Pemilihan Umum Indonesia 2014 dan 2019: Dalam pemilihan umum Indonesia 2014 dan 2019, terdapat beberapa imam dan ulama yang mendukung salah satu pasangan calon dan menyebarkan pesan-pesan politik melalui media sosial. Hal ini menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Adapun dalam skala nasional, Mikhael dan Atwar menunjukkan beberapa kasus tindakan politik yang ditemukan dalam kalangan hierarki Gereja. Misalnya di NTT, dalam dua periode pemilihan Gubernur serta beberapa kali pemilihan Bupati dan Wali Kota Kupang, kaum hierarki justru terlibat dalam memberikan dukungan terhadap aktor politik tertentu<sup>8</sup>.

Menanggapi fakta di atas, Mikhael dan Atwar memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuasaan oleh para aktor politik tergantung sikap kekuasaan Gereja dalam memengaruhinya. Artinya dukungan Gereja menjadi hal

---

<sup>6</sup>Diambil dari: <https://www.hidupkatolik.com/2021/01/22/51394/presiden-biden-dan-dilema-umat-katolik-amerika.php> pada 3 Mei 2023.

<sup>7</sup>Diambil dari: <https://www.katolikku.com/news/pr-1615558314/lula-da-silva-presiden-baru-brasil-berpeluang-bekerja-sama-dengan-gereja-katolik-melayani-kebaikan-bersama?page=2> pada 3 Mei 2023.

<sup>8</sup>Bataona and Bajari, "Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa."

mutlak bagi siapa pun yang ingin menjadi pemimpin daerah atau pun sebagai calon legislatif. Bahkan ada pula sistem barter di dalamnya.

2. Ada pun sikap politisasi Gereja melalui politik identitas. Tindakan Gereja dalam politik identitas selalu mengarah pada politik praktis dan berdampak pada perpecahan dalam masyarakat. Yeni Lestari dalam penelitiannya tentang politik identitas di Indonesia, telah menguraikan tentang definisi politik identitas dari beberapa pandangan, dengan melihat dampaknya. Misalnya masalah hak individu atau etnis, ketidakadilan terhadap kelompok sosial tertentu, atau pemisahan dan pembedaan dalam masyarakat<sup>9</sup>.
3. Tindakan lain yang membahayakan ialah ketika umat dibuat ambigu oleh pemimpin gereja. Artinya seruan-seruan moral yang disampaikan oleh pemimpin gereja terkadang bukan karena demi kebaikan umum, melainkan karena kepentingan pribadi yang kemudian dikemas dibalik pesan-pesan moral.

Masalah itu nampak lewat praktik politik dalam ralasi yang dimanfaatkan oleh rezim kuasa sipil terhadap pemimpin Gereja. Gereja dimanfaatkan untuk mengejar nominal suara yang hendak dicapai.

Kitab Hukum Kanonik (dalam bahasa Latin disebut *Codex Iuris Canonici*) menyatakan bahwa uskup pastor dan diakon harus menghindari kegiatan politik yang bisa menimbulkan konflik dengan tugas kudus mereka, seperti memberkati dan merawat umat yang dipercayakan kepada mereka. Dalam kan. 285§3, disebutkan bahwa pastor dan diakon seharusnya menghindari “semua kegiatan yang tidak konsisten dengan fungsi rohani mereka khususnya kegiatan politik yang harus dihindari kecuali jika tuntutan tugas memerlukannya.” Sedangkan kan. 287, menyebutkan bahwa uskup tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Yuni Lestari Sri, “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama,” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 12.

<sup>10</sup> KHK, *Kitab Hukum Kanonik (Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, ed. Mgr. Robertus Rubiyatmoko, 6th ed. (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1983).

Sebenarnya Gereja Katolik tidak secara mutlak melarang hierarki gerejanya terlibat dalam politik, namun mereka dihimbau untuk tidak terlibat dalam politik praktis secara langsung atau terlibat dalam kegiatan partai politik. Sebagai ganti terlibat dalam politik praktis secara langsung, para pemimpin gereja diharapkan memberi pandangan dan nasihat moral dan etika pada isu-isu politik dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

Dalam Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, Konsili Vatikan II nomor 31 dijelaskan bahwa para pemimpin gereja harus berperan sebagai gembala rohani dan tidak terlibat dalam kegiatan partai politik. Sebagai ganti terlibat dalam politik praktis, para pemimpin gereja diharapkan memberikan pandangan dan nasihat moral dan etika pada isu-isu politik dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan negara <sup>11</sup>. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Gereja Katolik, bahwa tindakan politik harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Ajaran Katolik yang harus dipegang untuk terhindar dari politik praktis antara lain:

- *Prinsip kebebasan dan martabat manusia*: Ajaran Katolik sebagaimana dalam <sup>12</sup> mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan setiap manusia berhak atas kebebasan berpikir, berkata, dan bertindak dalam batas-batas moral dan etika. (GS 16).
- *Prinsip keadilan sosial*: Ajaran Katolik mengajarkan bahwa semua manusia harus diperlakukan dengan adil dan setiap individu berhak atas hak yang sama. Prinsip ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, air, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. (GS 73).
- *Prinsip solidaritas*: Ajaran Katolik mengajarkan bahwa manusia harus saling membantu dan berbagi tanggung jawab satu sama lain, terutama

---

<sup>11</sup>Vatican Council II, “Lumen Gentium [Dogmatic Constitution on the Church, Light of the Nations],” 1964.

<sup>12</sup>“Gaudium et Spes,” *Managerial Economics of Non-Profit Organizations*, no. 19 (2021): 130–31, <https://doi.org/10.4324/9780203930847-17>.

kepada yang paling membutuhkan. Prinsip ini juga mencakup kewajiban untuk menjaga lingkungan alam demi kesejahteraan manusia. (SRS 38).

- *Prinsip tanggungjawab dan akuntabilitas*: Ajaran Katolik mengajarkan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya dan harus siap mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Tuhan dan masyarakat KGK 1731<sup>13</sup>.

Keterlibatan dalam kehidupan politik dan sosial, hirarki gereja harus memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika ini dan memberikan pandangan dan nasihat moral dan etika pada isu-isu politik dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Hierarki gereja diharapkan membimbing dan mengajarkan umatnya untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial dengan menghormati martabat manusia, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Terlibatnya hierarki gereja dalam politik praktis dapat membawa beberapa bahaya sebagai berikut:

- *Hilangnya otoritas rohani*. Terlibat dalam politik praktis dapat menimbulkan kesan bahwa para pemimpin gereja menggunakan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan politik atau mencari dukungan dari kelompok tertentu. Hal ini dapat mengurangi otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin gereja sebagai gembala rohani. Dalam pandangan Mgr. Agustinus melihat bahwa politik Katolik bukan merupakan kesempatan untuk berkuasa dengan menggunakan jabatan yang dimiliki, melainkan berdasarkan hati nurani demi kesejahteraan banyak orang. Karena itu, perlu diperhatikan tiga hal yaitu relasi kuasa, relasi ekonomi, dan relasi sosial. Relasi kuasa untuk memperbaiki sistem politik, relasi ekonomi untuk memperbaiki sistem ekonomi dan relasi sosial untuk memperbaiki sistem sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Douglas Pratt, "Catechism of the Catholic Church 268," *The Church and Other Faiths*, 2016, <https://doi.org/10.3726/978-3-0351-0016-7/66>.

<sup>14</sup>Mgr. Agustinus Agus, *Politik Katolik Politik Kebaikan Bersama*, ed. Kasdin Sihotang Mikhael Dua, Febiana R. Kainama, 1st ed. (Jakarta: Obor, 2008).

- *Perpecahan dalam masyarakat.* Terlibat dalam politik praktis dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan gereja, karena adanya perbedaan pandangan politik dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengganggu persatuan dan harmoni dalam masyarakat dan mengaburkan pesan moral etika yang ingin disampaikan oleh gereja.
- *Penyalahgunaan kekuasaan.* Terlibat dalam politik praktis dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyalahgunaan dana gereja untuk kepentingan politik, atau memberikan perlakuan khusus kepada kelompok atau individu tertentu.
- *Memburuknya citra gereja.* Terlibat dalam politik praktis dapat membahayakan citra gereja di mata masyarakat, khususnya jika tindakan politik yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang oleh ajaran Katolik.
- *Mengalihkan fokus dari tugas kudus.* Terlibat dalam politik praktis dapat mengalihkan fokus dari tugas kudus para pemimpin gereja, seperti memberkati dan merawat umat yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam hal ini, para pemimpin gereja seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang oleh ajaran gereja dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis yang dapat mengganggu tugas kudus mereka sebagai gembala rohani.

Untuk tidak terlibat dalam politik praktis, maka uskup, pastor dan diakon dapat melakukan beberapa hal berikut:

- *Memberikan pandangan moral dan etika.* Para pemimpin gereja dapat memberikan pandangan dan nasehat moral dan etika pada isu-isu politik dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Mereka dapat membimbing umat Katolik dalam memilih calon pemimpin dan kebijakan yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika.
- *Menjadi mediator dalam konflik.* Para pemimpin gereja dapat menjadi mediator dalam konflik sosial atau politik, membantu mencari solusi

damai dan memperjuangkan kepentingan umat dengan cara yang damai dan bermartabat.

- *Mengajak umat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.* Para pemimpin gereja dapat mengajak umat Katolik untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, misalnya dengan memilih calon pemimpin yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika, serta memberikan suara berkaitan dengan isu-isu moral dan etika.
- *Menggalang dukungan untuk isu-isu sosial.* Para pemimpin gereja dapat menggalang dukungan untuk isu-isu sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kemiskinan, perdamaian, keadilan, dan perlindungan lingkungan sebagaimana terdapat dalam ajaran sosial gereja.
- *Menyediakan tempat bertemu.* Gereja dapat menyediakan tempat bertemu bagi kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membahas isu-isu politik dan sosial, misalnya dengan mengadakan diskusi atau seminar tentang isu-isu tersebut.
- *Menyediakan sumber bacaan.* Gereja dapat menyediakan sumber bacaan dan literatur yang berkaitan dengan isu-isu politik dan sosial, sehingga umat Katolik dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu tersebut.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, para pemimpin gereja dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan adil, tanpa terlibat dalam politik praktis yang dapat mengganggu tugas kudus sebagai gembala rohani. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan etika pada isu-isu politik dan sosial yang dipahami oleh masyarakat dan negara, namun harus tetap netral dan tidak memihak pada kandidat tertentu. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjaga integritas, otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap gereja.

Dengan melakukan hal-hal tersebut para pemimpin gereja dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan adil, tanpa terlibat dalam politik praktis yang dapat mengganggu tugas kudus mereka sebagai gembala rohani.

## **Penutup**

Dampak keterlibatan hierarki dalam politik praktis dapat menimbulkan bahaya dalam Gereja Katolik sendiri. Artinya secara historis adanya kasus-kasus di mana Gereja Katolik terlibat dalam politik praktis dan memunculkan kontroversi serta kritik dari masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Gereja, dan bahkan merusak reputasi lembaga agama yang independen serta netral dalam urusan politik.

Keterlibatan hierarki dalam urusan politik praktis juga bisa mengarah pada kekeliruan pengambilan keputusan yang berdampak negatif pada masyarakat. Bila hierarki Gereja Katolik terlibat dalam urusan politik praktis, maka kemungkinan mereka lebih mementingkan kepentingan politik dari pada kepentingan moral dan agam. Hal ini tentunya menyebabkan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Gereja. Misalnya dukungan terhadap kebijakan yang tidak adil, atau melawan hak asasi manusia. Pada hal sesungguhnya Gereja selalu mengajarkan agar setiap tindakan yang tidak adil serta pelanggaran hak asasi manusia, harus dilawan.

Dengan demikian Gereja Katolik perlu untuk mempertahankan independensi dan netralitasnya dalam urusan politik praktis, meskipun Gereja memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat dan politik, namun Gereja harus tetap menjaga kesucian dan martabat ajarannya. Sebagai hierarki perlu tetap mempertahankan ajaran-ajaran Gereja dengan tetap membedakan antara ajaran Gereja dan urusan politik praktis.

## Daftar Pustaka

- Agus, MGR. Agustinus. *Politik Katolik Politik Kebaikan Bersama*. Edited by Kasdin Sihotang Mikhael Dua, Febiana R. Kainama. 1st ed. Jakarta: Obor, 2008.
- Bataona, Mikhael Rajamuda, and Atwar Bajari. “Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (2017)
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 7th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- “Gaudium et Spes.” *Managerial Economics of Non-Profit Organizations*, no. 19 (2021): 130–31. <https://doi.org/10.4324/9780203930847-17>.
- KHK. *Kitab Hukum Kanonik (Edisi Resmi Bahasa Indonesia)*. Edited by Mgr. Robertus Rubiyatmoko. 6th ed. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1983.
- Lestari Sri, Yuni. “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama.” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018).
- Pratt, Douglas. “Catechism of the Catholic Church 268.” *The Church and Other Faiths*, 2016. <https://doi.org/10.3726/978-3-0351-0016-7/66>.
- Riyanto, E. Armanda. *Berfilsafat Politik*. 5th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Sermad, Donatus. “Hubungan Antara Agama Dan Negara Di NKRI Dalam Sorotan Filsafat Politik.” *Jurnal Studia Philosophica Theologica* Vol. 33, No. 32, 2023 (2022).
- Vatican Council II. “Lumen Gentium [Dogmatic Constitution on the Church, Light of the Nations],” 1964.
- Obon, Beni “Presiden Biden dan Dilema Umat Katolik Amerika.” *Hidup Katolik*, 22 Januari 2021: <https://www.hidupkatolik.com/2021/01/22/51394/presiden-biden-dan-dilema-umat-katolik-amerika.php>
- Perajaka, Maximus “Lula da Silva, Presiden Baru Brasil Berpeluang Bekerja Sama dengan Gereja Katolik Melayani Kebaikan Bersama.” *Katolikku.com*, 22 November 2022 <https://www.katolikku.com/news/pr-1615558314/lula-da-silva-presiden-baru-brasil-berpeluang-bekerja-sama-dengan-gereja-katolik-melayani-kebaikan-bersama?page=2>

